



**PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG**

# **RENCANA KERJA**

**DINAS KETENAGAKERJAAN**

**2025**



[disnaker.deliserdangkab.go.id](http://disnaker.deliserdangkab.go.id)



[disnaker\\_deliserdang](https://www.instagram.com/disnaker_deliserdang)

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana tahapan dan cara penyusunan Renja PD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja OPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdng Tahun 2024 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026.

Penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang yang melaksanakan teknis kegiatan. Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2025-2029 dan Renja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

### 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025;

20. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
21. Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 050/400 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta proyeksi Tahun 2026;
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerahm serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu di sajikan adalah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja;
5. Implikasinya yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan program PD; Khusus peovinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara PD provinsi dengan PD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian/kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran table

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. Tabel Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting sasaran target Kinerja Renstra PD.

**3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:**

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.  
Misal :
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
  - b. Penurunan tingkat pengangguran terbuka
  - c. Pengentasan kemiskinan
  - d. Dsb
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Isi sesuai dengan cetakan Renja 2025 di SIPD-RI

**BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

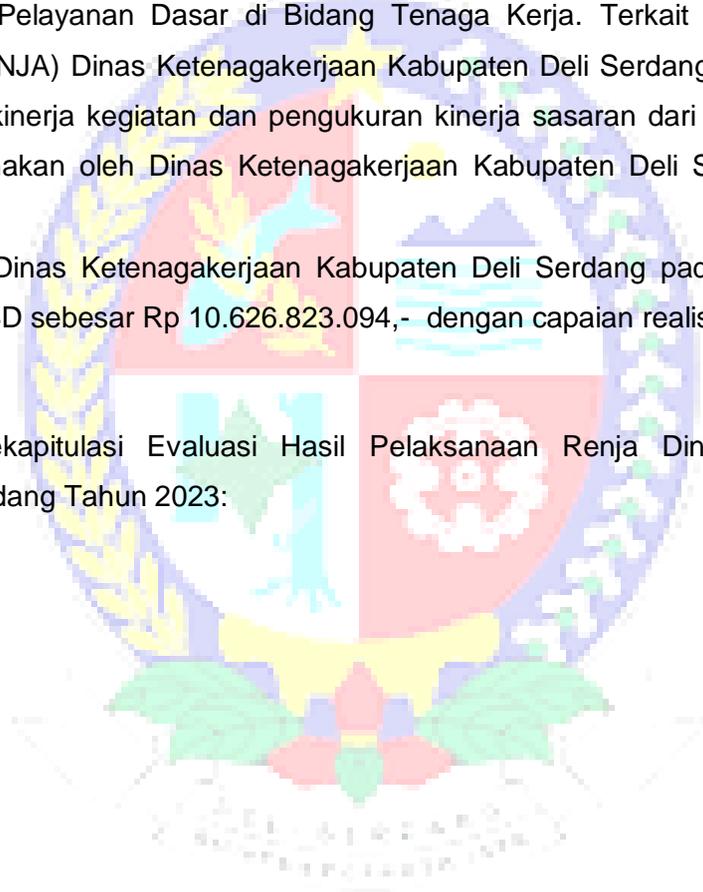
1. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Bidang Tenaga Kerja. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023.

Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 10.626.823.094,- dengan capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 75,6%.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023:



Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan  
 Tahun 2023  
 (Tabel T-C 29)

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada Akhir RPJMD (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	6.932.951.737	80	6.610.250.361	88.57	951.203.044	89	2.290.576.801	88.57	3.491.722.042	88.57	4.958.378.273	90	4.958.378.273				
			2) Nilai LHE AKIP	Poin	78		76		70.17		70.17		70.17		70.17		70					
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	%				76.038.866	13	9.507.000	16	21.578.000	27	42.461.000	44	69.685.000	100	69.685.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan				76.038.866		9.507.000		21.578.000		42.461.000		69.685.000		69.685.000				
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%				4.838.555.697		725.718.737		1.892.454.683		2.692.471.025		3.649.234.690		3.649.234.690				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	orang				4.706.058.817		706.608.737		1.857.384.683		2.625.481.025		3.527.224.690		3.527.224.690				

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen				132.496.880		19.110.000		35.070.000		66.990.000		122.010.000		122.010.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	%				22.750.000		-		-		-		-		-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel				22.750.000		-		-		-		-		-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	%				659.618.607		24.999.900		104.867.001		186.849.191		378.575.047		378.575.047
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket				21.634.090		-		1.692.000		3.187.000		6.381.000		6.381.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	paket				203.307.200		-		-		-		75.650.000		75.650.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket				41.202.225		-		6.561.400		12.839.400		24.482.900		24.482.900
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket				40.681.492		6.779.900		6.779.900		13.639.900		21.609.900		21.609.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dokumen				28.989.600		-		7.215.000		14.910.000		22.130.000		22.130.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan				6.270.800		-		-		390.000		390.000		390.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan				317.533.200		18.220.000		82.618.701		141.882.891		227.931.247		227.931.247
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	%				86.692.221		-		-		-		4.950.000		4.950.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit				38.036.000		-		-		-		-		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana	unit				48.656.221		-		-		-		4.950.000		4.950.000



Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	dokumen				867.676.468	-	-	-	83.049.900	-	229.995.140	-	636.427.540	-	636.427.540			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	%				867.676.468				83.049.900		229.995.140		636.427.540		636.427.540			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	paket				10.987.456		1.480.000		2.380.000	-	3.625.000		10.952.000		10.952.000			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	paket				10.987.456		1.480.000		2.380.000		3.625.000		10.952.000		10.952.000			
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	lembaga				17.775.204	-	1.480.000	-	1.480.000	-	8.810.000	-	15.955.500	-	15.955.500			
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	lembaga				17.775.204		1.480.000		1.480.000		8.810.000		15.955.500		15.955.500			
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	%	75		74	118.816.409	-	2.000.000	-	2.000.000	-	6.272.500	53,60	15.257.500	-	15.257.500			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan dan informasi pasar kerja	orang				38.146.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pelayanan antar Kerja	Jumlah pelayanan dan informasi pasar kerja	orang				38.146.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	orang				80.669.585	-	2.000.000	-	2.000.000	-	6.272.500	-	15.257.500	-	15.257.500			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang				20.339.640		2.000.000		2.000.000		6.272.500		15.257.500		15.257.500			
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	orang				60.329.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	%	100		100	3.001.317.196	-	1.480.000	-	767.059.800	89,62	1.617.061.300	-	2.396.755.300	-	2.396.755.300			

	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	laporan				168.082.980	-	-	-	29.550.000	-	93.060.000	-	153.092.500	-	153.092.500				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	laporan				168.082.980	-	-	-	29.550.000	-	93.060.000	-	153.092.500	-	153.092.500				
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	%				2.833.234.216	-	1.480.000	-	737.509.800	-	1.524.001.300	-	2.243.662.800	-	2.243.662.800				
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	perkara				26.185.168	-	1.480.000	-	4.030.000	-	11.135.000	-	13.755.000	-	13.755.000				
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi				150.959.836	-	-	-	108.731.000	-	111.822.500	-	117.440.000	-	117.440.000				
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga				301.858.492	-	-	-	62.100.000	-	193.023.000	-	259.075.000	-	259.075.000				
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang				2.354.230.720	-	-	-	562.648.800	-	1.208.020.800	-	1.853.392.800	-	1.853.392.800				
<b>TOTAL</b>							<b>10.626.823.094</b>		<b>957.643.044</b>		<b>3.146.546.501</b>		<b>5.357.485.982</b>		<b>8.033.726.113</b>		<b>8.033.726.113</b>				

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019- 2024 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang tenaga kerja telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Capaian kineja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	67,62	98
Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	90	112,50
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76	70,17	92,33

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada Nilai realisasi IKM dengan target 80 poin dan realisasinya 90 sehingga capaian kinerjanya 112,50 %, pada Nilai LHE AKIP dengan target 76 poin dan realisasinya 70,17 poin capaian kinerja 92,33%, sedangkan dengan realisasi TPAK 67,62% dari target 69% dengan capaian kinerja 98%.

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan  
Tahun 2023  
(Tabel T-C 30)

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN					TAHUN					2024	2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,2	67,8	68	69	70	67,23	66,78	66,84	67,62	-	68	69	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78	79	80	81		88,80	88,57	90	-	90,5	91	
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70	72	74	76	78		85,50	70,17	70,17	-	71	72	

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketenagakerjaan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

✓ **Faktor pendukung :**

- a) Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;
- b) Adanya komitmen dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan;
- c) Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak terkait (Pekerja, Pengusaha dan instansi terkait).
- d) Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;
- e) Perlu adanya program kegiatan yang mendukung sehingga dapat di rasakan oleh masyarakat agar jumlah pengangguran di Kabupaten Deli Serdang dapat diturunkan.

✗ **Faktor Penghambat**

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan;
- b) Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai;
- c) Belum optimalnya fungsi dan peran agama, tokoh adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
- d) Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak terkait;
- e) Sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat yang kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi sebagai berikut :

1. Mensolidkan koordinasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kegiatan;
3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh agama dalam mengurangi penyakit sosial masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

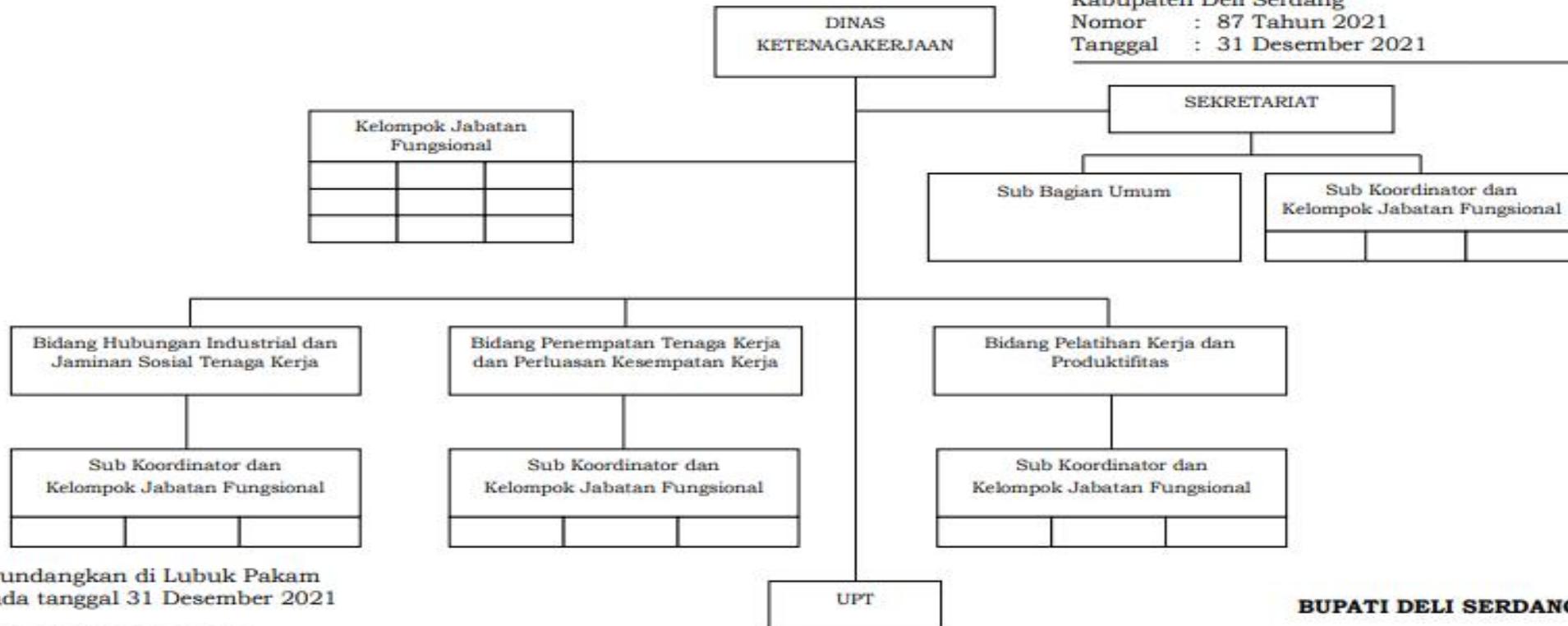
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Ketangakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 2.1  
Struktur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 87 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

**DARWIN ZEIN**

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor : 87

**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

**ASHARI TAMBUNAN**



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023 sudah tergolong baik. Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan tenaga kerja di Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menyelenggarakan pelayanan tenaga kerja, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Isu strategis yang menjadi permasalahan utama bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Masih rendahnya angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dibandingkan dengan TPAK Nasional dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja sehingga tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja;
4. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
5. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial;
6. Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja;
7. Masih banyaknya pekerja dan pengusaha yang belum memahami Peraturan Ketenagakerjaan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sudah semua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sudah diakomodir. Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Ketenagakerjaan

Tahun 2025  
(Tabel T-C 31)

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Dana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Dana	Catatan Penting
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Deli Serdang	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73	7.538.279.638	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Deli Serdang	Nilai LHE AKIP	73	7.522.907.638	
		Nilai IKM	83,6				Nilai IKM	83,6		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran		91.675.530	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	87	91.675.530	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Oenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	91.675.530	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	91.675.530	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan	87%	5.549.504.793	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan	87%	5.549.504.793	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.377.733.029	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.377.733.029
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	171.771.764	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	171.771.764
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	86%	21.157.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	86%	21.157.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31 stel	21.157.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	31 stel	21.157.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	77%	627.963.684	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	77%	627.963.684
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	8.489.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 paket	8.489.250
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	213.472.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	213.472.560
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik	10 paket	33.979.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik	10 paket	33.979.100

	kantor yang disediakan								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	28.522.414	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	28.522.414		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	39.290.160	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 dokumen	39.290.160		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	11 laporan	13.650.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	11 laporan	13.650.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	290.560.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	290.560.200		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	75%	57.426.832	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	75%	57.426.832		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 unit	39.937.800	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	39.937.800		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kamtor yang disediakan	25 unit	17.489.032	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung	25 unit	17.489.032		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	75%	927.998.799	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	75%	927.998.799
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 laporan	90.285.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 laporan	90.285.300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 laporan	19.435.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 laporan	19.435.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diadakan	10 laporan	818.277.999	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 laporan	818.277.999
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	75%	262.552.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	75%	247.180.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	231.808.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	231.808.500

Dinas Jabatan					Jabatan	Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	15.372.000		Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Kantor Yang Dipelihara	10 unit	15.372.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara		15.372.000		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 dokumen	50.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen RTK yang disusun	1 dokumen	262.041.333		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	1 dokumen	50.000.000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	262.041.333		Penyusuna n Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	50.000.000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	262.041.333		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	87%	135.000.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	100 Paket	1.084.479.782		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Paket	5.000.000	

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	100 Paket	915.560.503	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	1600 orang	5.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1600 orang	915.560.503	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	25 lembaga	130.000.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	25 lembaga	150.255.315	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	25 lembaga	130.000.000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	25 lembaga	150.255.315	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	76%	375.000.000	
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 perusahaan	18.663.964	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	200 orang	70.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 perusahaan	18.663.964	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	200 orang	70.000.000	
PROGRAM	Persentase	76%		Pengelolaan	Jumlah	3050		

PENEMPATAN TENAGA KERJA	pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		105.012.755	Informasi Pasar Kerja	pelayanan dan informasi pasar kerja	orang	245.000.000	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 orang	24.743.996	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 orang	45.000.000	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKAL	200 orang	24.743.996	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfait/bursa kerja	50 orang	200.000.000	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	3050 orang	47.546.559	Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	60.000.000	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 orang	19.487.456	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI /Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	60.000.000	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfait/bursa kerja	50 orang	28.059.103	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	4.048.113.455	

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1000 orang	32.722.200	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 laporan	170.081.936	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	32.722.200	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 laporan	170.081.936	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	4.048.113.455	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	3.878.031.519	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	180 perkara	170.081.936	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	180 perkara	23.575.595	

Kabupaten/Kota									
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		170.081.936	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Asosiasi dan SP/SB	189.080.258		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		180 perkara	3.878.031.519	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	277.487.666		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara hubungan industrial yang diselesaikan	180 perkara	23.575.595	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16805 orang	3.387.888.000		

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan SP/SB yang diverifikasi	25 Asosiasi dan SP/SB	189.080.258						
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	277.487.666						
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Jumlah pekerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja (JKK dan JKM)	16805 orang	3.387.888.000						



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2025 yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun bidang-bidang teknis masing-masing yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang teknis di kecamatan.

Adapun rekapitulasi usulan aspirasi dari masyarakat untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025**  
(Tabel T-C 32)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN	LOKASI	JUMLAH USULAN	CATATAN
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi/Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Barista	Deli Tua, Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam	6	Diteruskan ke tahap selanjutnya
2	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	Hamparan Perak, Lubuk Pakam, Galang, Pagar Merbau, Pancur Batu, Batang Kuis, Pantai Labu, Deli Tua, Kutalimbaru, Galang, Sibiru-biru, Namorambe, STM Hulu	47	Diteruskan ke tahap selanjutnya
3		Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	Sibolangit	1	Diteruskan ke tahap selanjutnya
4		Pelatihan Pembuatan Hiasan Busana Dengan Mesin Bordir	Pancur Batu, Sunggal, Namorambe, Kutalimbaru	5	Diteruskan ke tahap selanjutnya

5		Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	Pagar Merbau, Galang, Lubuk Pakam, Batang Kuis, Namorambe, Tanjung Morawa, Bangun Purba	12	Diteruskan ke tahap selanjutnya
6		Pelatihan Pengelasan SMAW 2F PB	Pagar Merbau, Kotalimbaru	2	Diteruskan ke tahap selanjutnya
7		Pelatihan Practical Office Advance (Komputer)	Pancur Batu, Pantai Labu, STM Hilir	3	Diteruskan ke tahap selanjutnya
8		Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional	Namorambe, STM Hilir, Kotalimbaru, Pancur Batu, Tanjung Morawa	9	Diteruskan ke tahap selanjutnya
9		Pelatihan Tata Rias Pengantin dan Hantaran	Pantai Labu, Pancur Batu, Batang Kuis, Bangun Purba, Sibiru-biru	20	Diteruskan ke tahap selanjutnya
10		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Menjahit	Tanjung Morawa	1	Diteruskan ke tahap selanjutnya
11		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Tata Rias	Bangun Purba	1	Diteruskan ke tahap selanjutnya
12		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Kreasi Farcel	Bangun Purba	1	Diteruskan ke tahap selanjutnya
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	

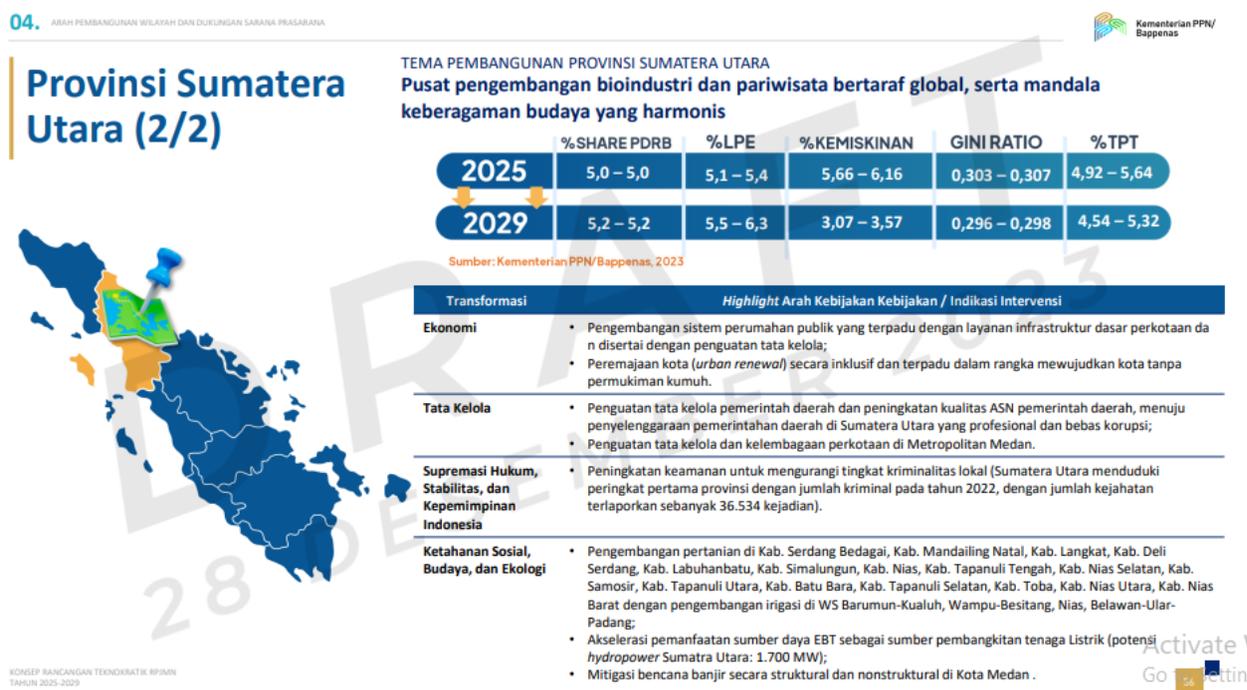
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.. Renja tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional tatanan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 salah satu isu strategis di wilayah Sumatera bidang ketenagakerjaan adalah belum optimalnya kualitas SDM. Dalam hal transformasi ekonomi, isu nasional di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dimana produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas tenaga kerja di Jepang tahun 1960-an. Selain itu produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN.



Gambar 3.1 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menjabarkan dalam program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025 antara lain :

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan kerja, pembinaan LPKS, peningkatan dan pengukuran produktifitas, serta monitoring ke perusahaan.
- Program Penempatan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, memfasilitasi CPMI/PMI/PMI Purna, serta memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja.
- Program Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memfasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), memfasilitasi penyelesaian/mediasi perselisihan hubungan industrial, monitoring pengupahan serta pendataan ketenagakerjaan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**  
**Periode Tahun 2025-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran\	Satuan	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode RPD	
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	6,90%	7,70-6,80%	6,80-6,50%	6,80-6,50%
						70%	71,39%	72,39%	72,39%
2	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LHE AKIP	Meningkatnya Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	78	73 Poin	74 Poin	74 Poin
3	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	81	83.60 poin	83.61 poin	83.61 poin

### 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  
Dinas Ketenagakerjaan TA. 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2026
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai LHE AKIP	73	74
	Nilai IKM	83,6	83,61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	87	88
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	87%	88%
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	40 orang/bulan
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	10 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	86%	87%
<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	31 stel	33 stel
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	77%	78%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 paket	10 paket
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	5 paket	5 paket
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	10 paket
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	10 paket
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 dokumen	10 dokumen
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	11 laporan	11 Laporan
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	10 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	75%	77%
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit
<i>Pengadaan Sarana dan</i>	Jumlah Pengadaan Sarana	25 unit	25 unit

<i>Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dan Prasarana Gedung		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	75%	77%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 laporan	10 laporan
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 laporan	10 laporan
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 laporan	10 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	75%	77%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	7 unit
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana Kantor Yang Dipelihara	10 unit	10 unit
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	1 dokumen
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	87%	88%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Paket	110 paket
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	108 paket	110 paket
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		
<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	25 lembaga	25 lembaga
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	76%	77%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	200 orang	220 orang
<i>Pelayanan antar Kerja</i>	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	200 orang	220 orang
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan dan informasi pasar kerja	3050 orang	3575 orang
<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 orang	3500 orang

<i>Job Fair/Bursa Kerja</i>	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	50 orang	75 orang
Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	1100 orang
<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI /Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 orang	1100 orang
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 laporan	4 laporan
<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 laporan	4 laporan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%
<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	180 perkara	180 perkara
<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Asosiasi dan SP/SB	25 Asosiasi dan SP/SB
<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	1 Lembaga
<i>Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16805 orang	16805 orang

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun berdasarkan usulan program/kegiatan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan dan usulan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat terkait ketenagakerjaan. Jumlah program yang diusulkan pada Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini berjumlah 5 (lima) program dan kegiatan berjumlah 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Lokasi kegiatan untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat terdapat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, dan untuk pelatihan kerja dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Deli Serdang baik secara *non boarding* maupun *mobile* di beberapa desa yang terdapat diberbagai kecamatan. Sedangkan untuk program teknis lainnya dilakukan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ataupun lokasi lain sesuai dengan efektifitas dan efisiensi.

Rincian rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
(Tabel T-C. 33)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Loka si	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2025)	Prakiraan Maju (2026)	Keterangan Dukungan Kegiatan/Sub Kegiatan		
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				SPM	Prioritas Provsu	Prioritas Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemantapan Pelaksanan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LHE AKIP dan Nilai IKM Perangkat Daerah	DINAS KETENAGAKERJAAN	Persentase laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Akurat dan Tepat Waktu	86 %					7.522.907.638	8.283.519.015		4	7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	87 %			91.675.530	100.843.083		4	7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	91.675.530	100.843.083		4	7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	87 %			5.549.504.793	6.095.866.684		4	7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Jumlah Pembayar an Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	5.377.733.029	5.915.506.332		4	7
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	171.771.764	180.360.352		4	7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	86 %			21.157.500	23.273.250		4	7
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									Jumlah pakaian dinas beserta	31 stel	21.157.500	23.273.250		4	7

									atribut kelengkapan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persertase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	77 %			627.963.684	690.760.053		4	7
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		10 paket	8.489.250	9.338.175		4	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		10 paket	213.472.560	234.819.816		4	7	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		10 paket	33.979.100	37.377.010		4	7	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		10 paket	28.522.414	31.374.656		4	7	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 dokumen	39.290.160	43.219.176		4	7	

Fasilitasi Kunjungan Tamu								Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	11 laporan	13.650.000	15.015.000		4	7
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	290.560.200	319.616.220		4	7
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor	75		57.426.832	63.169.515		4	7
Pengadaan Mebel								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	39.937.800	43.931.580		4	7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung	25 unit	17.489.032	19.237.935		4	7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	87 %		927.998.799	1.020.798.679		4	7
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 laporan	90.285.300	99.313.830		4	7
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah Laporan Penyediaan	11 laporan	19.435.500	21.379.050		4	7

									n Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 laporan	818.27 7.999	900.10 5.799		4	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	75 %			247.18 0.500	271.89 8.550		4	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	231.80 8.500	254.98 9.350		4	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	10 unit	15.372. 000	16.909. 200		4	7

	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	DINAS KETENAGAKERJAAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen					50.000.000	60.000.000		2	1
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	1 Dokumen			50.000.000	60.000.000		2	1
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		50.000.000	60.000.000		2	1
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	DINAS KETENAGAKERJAAN	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	87 %					135.000.000	5.650.000.000		2	1
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	256 Orang			5.000.000	5.500.000.000		2	1

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	100 Paket	5.000.000.000	5.500.000.000		2	1
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	25 LPKS		130.000.000	150.000.000		2	1
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang dibina	25 LPKS		130.000.000	150.000.000		2	1
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	DINAS KETENAGAKERJAAN	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	76 %					375.000.000	365.000.000		2	1
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang		70.000.000	90.000.000		2	1

Pelayanan antar Kerja									Jumlah Pelayanan Antar Kerja	200 Orang	70.000.000	90.000.000		2	1
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3050 Orang			245.000.000	275.000.000		2	1
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 Orang	45.000.000	55.000.000		2	1
Job Fair/Bursa Kerja									Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfait/bursa kerja	50 Orang	200.000.000	220.000.000		2	1

Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 Orang		60.000.000	75.000.000		2	1
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI /Pekerja Migran Indonesia (PMI)								Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1000 Orang		60.000.000	75.000.000		2	1
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	DINAS KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%					4.048.13.455	4.452.924.801		2	1
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota								Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan		170.081.936	187.090.129		2	1

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	170.08 1.936	187.09 0.129		2	1
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100 %			3.878.0 31.519	3.927.0 45.872		2	1
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	180 Kasus	23.575. 595	25.933. 155		2	1
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat									Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja	25 Asosiasi	189.08 0.258	207.98 8.284		2	1

Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi															
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									Jumlah LKS Tripartit yang dibina	25 Lembaga	277.487.666	305.236.433		2	1
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16805 Orang	3.387.888.000	3.387.888.000		2	1
<b>TOTAL PAGU</b>											<b>17.126.021.093</b>	<b>18.811.443.816</b>			

**Keterangan :**

**Prioritas Daerah**

- 1 Pembangunan Sosial melalui Peningkatatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 2 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing
- 3 Pembangunan Infarstruktur Dasar dan Aksesibilitas Kewilayahan

**SPM**

- 1 SPM Pendidikan
- 2 SPM Kesehatan
- 3 SPM PUPR

4 Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4 SPM Tantribmas

5 SPM Sosial

**Sasaran Daerah**

**Tujuan 1**

- 1 Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
- 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

**Tujuan 2**

- 3 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- 4 Meningkatkan investasi
- 5 Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha
- 6 Menurunnya kemiskinan

**Tujuan 3**

- 7 Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi
- 8 Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman
- 9 Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

**Tujuan 4**

- 10 Meningkatnya rasa aman, penegakan hukum dan ketertiban

**Tujuan 5**

- 11 Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 12 Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah

**Prioritas Provinsi Sumatera Utara**

- 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 2 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
- 3 Peningkatan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan
- 4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

**Prioritas Nasional**

- 1 Memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- 4 Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan
- 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6 Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

## P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Deli Serdang serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran penunjang visi dan misi Kabupaten Deli Serdang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang maupun perangkat daerah yang membidangi fungsi lain. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, 2024  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN DELI SERDANG



BUDI ISWAN SINAGA, S.STP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19751105 199703 1 001